

# **Pengaruh Penerimaan APBD Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat**

This study aims to examine the effect of local taxes, regional levies, profit-sharing fund general allocation funds and special allocation funds for regional financial independence in districts/cities in West Sumatra Province. This study uses secondary data, namely data obtained from district/city APBD realization reports in West Sumatra Province from 2016-2020 by accessing the official website on the website of the Directorate General of Fiscal Balance and the Regional Financial Agency of West Sumatra Province. The data analysis technique was using panel data regression analysis. The results of the analysis in this study indicate that local taxes and revenue-sharing funds have a significant positive effect on regional financial independence, while special allocation funds have a significant negative effect on regional financial independence. Meanwhile, regional levies and general allocation funds have no significant effect on regional financial independence.

*Keywords: Taxes, Retribution, Revenue, DAU, DAK, Financial Independence*

**Marzuki<sup>1</sup>**  
**Chairil Akhyar<sup>2</sup>**  
**Nurlela<sup>3</sup>**  
**Fika Yandani<sup>4</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> FEB Universitas  
Malikussaleh  
\*Correspondent Author:  
marzuki@unimal.ac.id*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia yang ditandai dengan disahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Kemudian mengalami revisi sebanyak dua kali yaitu menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu daerah otonom akan mampu berotonomi apabila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan didaerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil. Adapun tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga daerah akan selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk memperoleh pendapatan daerahnya.

Berdasarkan pendapat Halim (2014), Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Mahmudi (2010) menyatakan peningkatan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian daerah merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan otonomi daerah yang sangat erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihasilkan oleh suatu daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 disebutkan bahwasanya sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber penerimaan daerah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dan pemerintahannya khususnya pada penerimaan PAD, disamping dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, Halim (2014)

mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonstruksi dan tugas pembantuan. Akan tetapi, diharapkan untuk setiap daerah agar tidak menjadikan dana perimbangan tersebut sebagai sumber utama pendaptan daerah tapi hanya menjadikannya sebagai dana pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom yang diberi wewenang dari pemerintah pusat dalam mengurus atau mengatur segala anggaran rumah tangganya sendiri dan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dijadikan sebagai penerimaan daerah. Potensi sumber daya ini meliputi pertambangan, pertanian/perkebunan, kehutanan, kelautan/perikanan, serta industri jasa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Definisi pajak daerah menurut Siahaan (2013) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang diharapkan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan suatu daerah karena kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dari peningkatan atau besar kecilnya PAD. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggali sumber potensi yang dapat memacu peningkatan PAD. Pada hasil penelitian Panca Wahyuningsih (2015) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan dimana dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang penting setelah PAD, yang

artinya dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang sangat penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah dikarenakan penerimaannya berdasarkan atas sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Penelitian Marizka (2013) berpendapat apabila pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat DBH, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.

### Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian dari komponen dana perimbangan berupa dana transfer yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah. Dana alokasi umum diharapkan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun penerimaan dana alokasi yang besar terhadap suatu daerah akan membuat tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi rendah dan belum dikatakan karena daerah belum mampu membiayai kegiatannya sendiri. Penelitian sebelumnya Muliana (2009) menunjukkan apabila dana alokasi umum yang di terima suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah tersebut berarti tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut masih rendah dan daerah tersebut belum dapat dikatakan mandiri sebab dalam membiayai kegiatan fiskalnya, daerah tersebut masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, maka dapat disimpulkan semakin meningkat DAU maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah.

### Dana Alokasi Khusus

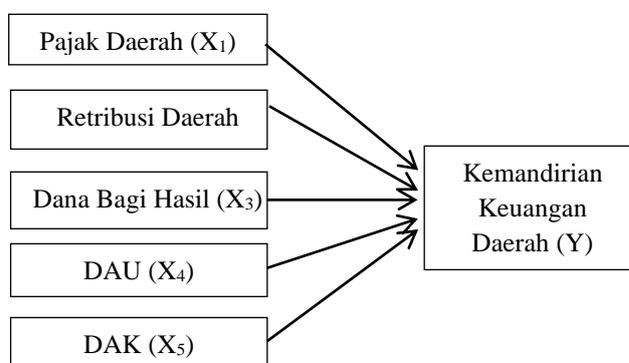
Dana alokasi khusus diharapkan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dana transfer dari pemerintah akan membantu pendapatan daerah akan tetapi sama halnya dengan dana alokasi umum, apabila dana alokasi khusus yang diterima daerah lebih besar maka akan membuat daerah tidak dapat dikatakan mandiri. Penelitian Yani (2013) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun pada penelitian Marizka (2013) terdapat hasil yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

### Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah dalam Laporan Realisasi APBD (Muliana 2009).

### Kerangka Konseptual

Berikut merupakan kerangka konseptual yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1  
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar diatas d dalam penelitian ini terlihat bahwa ada 5 (lima) variabel bebas atau independen yaitu Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Dana Bagi Hasil ( $X_3$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_4$ ), dan Dana Alokasi Khusus ( $X_5$ ), yang akan mempengaruhi 1 (satu) variabel terikat atau dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah ( $Y$ ). Untuk menguji pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dirumuskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- H<sub>2</sub> : Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- H<sub>3</sub> : Dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- H<sub>4</sub> : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H<sub>5</sub>: Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN

### Data

Sesuai dengan judul penelitian, maka objek pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2020 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Peimbangan dan tingkat kemandirian daerah. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan mengakses situs resminya yaitu [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mengakses situs resminya yaitu <https://dpkd.sumbarprov.go.id>

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini berupa laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 yang telah oleh penulis untuk dijadikan bahan dalam penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dimana data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross-section*. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F)..

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat seberapa besar korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis korelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan data pada Tabel 1, tentang korelasi antara seuruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel Kemandirian Keuangan Daerah. Ditemukan bahwa variabel pajak daerah berkorelasi positif dengan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,6365 dan signifikan. Retribusi daerah berkorelasi positif dengan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,5375 dan signifikan. DBH berkorelasi positif dengan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,4683 dan signifikan. DAU berkorelasi positif dengan Kemandirian

Keuangan Daerah sebesar 0,1968 dan signifikan. DAK berkorelasi negatif dengan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar -0,0776 dan tidak signifikan.

### Teknik Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Chow

Adapun hasil uji chow dalam penelitian ini terletak pada tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai probability untuk uji chow sebesar 0,0000 dimana angka tersebut berada di bawah nilai standar toleransi kesalahan yaitu 0,05 maka berdasarkan uji chow model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* sehingga diperlukan Uji hausman untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

### Uji Hausman

Adapun hasil uji hausman dalam penelitian ini terletak pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas pada Uji Hausman sebesar 0,8269. Nilai tersebut berada di atas nilai standar kesalahan yaitu 0,05. Pada penelitian ini Uji Hausman memilih *Random Effect Model (REM)* sebagai model yang tepat. Sehingga harus dilanjutkan pada Uji Lagrange Multiplier untuk membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

### Uji Lagrange Multiplier

Adapun hasil uji lagrange multiplier dalam penelitian ini terletak pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, nilai probabilitas pada uji lagrange multiplier sebesar 0.0000. Nilai tersebut berada di bawah standar kesalahan yaitu 0,05. Dimana model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Sehingga dalam penelitian ini, estimasi data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel dengan *Random Effect Model (REM)*.

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Korelasi**

Correlation						
t-Statistic						
Probability	KKD	PD	RD	DBH	DAU	DAK
KKD	1,0000					
	-----					
PD	0,6365	1,0000				
	7,9602	-----				
	0,0000	-----				
RD	0,5375	0,5960	1,0000			
	6,1469	7,1582	-----			
	0,0000	0,0000	-----			
DBH	0,4683	0,4782	0,2780	1,0000		
	5,1115	5,2521	2,7916	-----		
	0,0000	0,0000	0,0064	-----		
DAU	0,1968	0,6669	0,3855	0,4537	1,0000	
	1,9360	8,6324	4,0295	4,9100	-----	
	0,0559	0,0000	0,0001	0,0000	-----	
DAK	-0,0776	0,4229	0,014315	0,2868	0,8529	1,0000
	-0,7509	4,5014	0,138064	2,8881	15,758	-----
	0,4546	0,0000	0,8905	0,0048	0,0000	-----

Sumber : Data diolah dengan eviews9 (2022)

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10,266265	(18,71)	0,0000
Cross-section Chi-square	121,760339	18	0,0000

Sumber : Data diolah dengan eviews9 (2022)

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2,157820	5	0,8269

Sumber : Data diolah dengan eviews9 (2022)

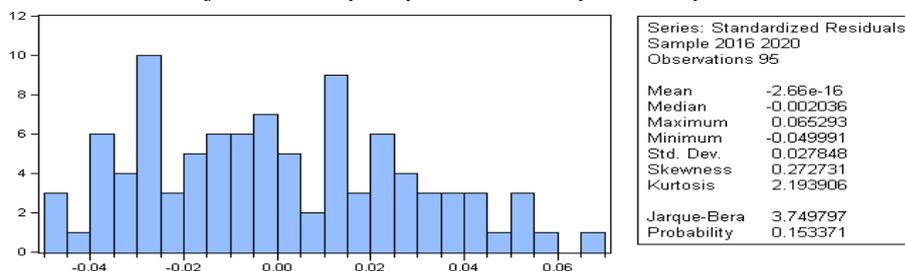
**Tabel 4**  
**Hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	75,16177 (0,0000)	6,885853 (0,0087)	82,04762 (0,0000)

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi akan disajikan pada gambar 1, table 5, tabl 6 dan table 7 berikut ini.

Untuk melihat uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : Hasil data diolah dengan eviews9 (2022)

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	PD	RD	DBH	DAU	DAK
PD	1,0000	0,5960	0,4782	0,6669	0,4229
RD	0,5960	1,0000	0,2780	0,3855	0,0143
DBH	0,4782	0,2780	1,0000	0,4537	0,2868
DAU	0,6669	0,3855	0,4537	1,0000	0,8529
DAK	0,4229	0,0143	0,2868	0,8529	1,0000

Sumber : Data diolah dengan eviews9 (2022)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1,748303	Prob. F(19,75)	0,0463
Obs*R-squared	29,16053	Prob. Chi-Square(19)	0,0635
Scaled explained SS	15,87657	Prob. Chi-Square(19)	0,6655

Sumber : Data diolah dengan eviews9 (2022)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0,612688	Mean dependent var	0,098966
Adjusted R-squared	0,590929	S.D. dependent var	0,043982
S.E. of regression	0,028130	Akaike info criterion	-4,242863
Sum squared resid	0,070427	Schwarz criterion	-4,081566
Log likelihood	207,5360	Hannan-Quinn criter.	-4,177687
F-statistic	28,15780	Durbin-Watson stat	1,103550
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : Data diolah dengan eviews9 (2022)

Berdasarkan gambar di atas hasil uji normalitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai antara probabilitas dengan nilai signifikan yaitu 0,05 dengan ketentuan jika nilai probabilitas > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas > 0,05 yaitu sebesar 0,153371 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan layak untuk dilanjutkan dengan pengujian yang lainnya.

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa tidak ada nilai cell antar variabel berada di atas 0,9. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Pada Tabel 6, dapat dilihat nilai probability chi-square dari obs\*Rsquared sebesar 0,0635 lebih besar

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada model ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,103550 yang artinya nilai DW pada penelitian ini berada di antara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

#### Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model yang sudah dilakukan, maka model yang tepat dan cocok pada penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Adapun hasil regresi data panel dengan *Random Effect Model* dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model (REM)***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,0386	0,5584	-0,0692	0,9450
PD	0,0285	0,0063	4,5300	0,0000
RD	0,0073	0,0050	1,4708	0,1449
DBH	0,0146	0,0065	2,2312	0,0282
DAU	-0,0162	0,0294	-0,5539	0,5810
DAK	-0,0234	0,0106	-2,1929	0,0309
R-squared	0,3200	Mean dependent var		0,0268
Adjusted R-squared	0,2819	S.D. dependent var		0,0192
S.E. of regression	0,0163	Sum squared resid		0,0237
F-statistic	8,3802	Durbin-Watson stat		2,3610
Prob(F-statistic)	0,0000			

Sumber : Data diolah dengan evIEWS9 (2022).

**Tabel 9**  
**Hasil Regresi penambahan Variabel Dummy Pajak dengan *Random Effect Model (REM)***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,1406	0,3770	-0,3729	0,7101
PD	0,0359	0,0054	6,6212	0,0000
RD	0,0090	0,0055	1,6389	0,1048
DBH	0,0218	0,0072	3,0083	0,0034
DAU	-0,0349	0,0282	-1,2384	0,2189
DAK	-0,0140	0,0137	-1,0261	0,3076
DUMMY	-0,0184	0,0087	-2,1005	0,0385
R-squared	0,6311	Mean dependent var		0,0989
Adjusted R-squared	0,6060	S.D. dependent var		0,0439
S.E. of regression	0,0276	Akaike info criterion		-4,2707
Sum squared resid	0,0670	Schwarz criterion		-4,0825
Log likelihood	209,85	Hannan-Quinn criter.		-4,1946
F-statistic	25,099	Durbin-Watson stat		0,9070
Prob(F-statistic)	0,0000			

Sumber : Data diolah dengan evIEWS9 (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKD = -0,0386 + 0,0285Pd + 0,0073Rd + 0,0146DBH - 0,0162DAU - 0,0234DAK$$

Dilihat pada persamaan di atas, bahwa terdapat nilai konstanta (C) sebesar -0,0386 yang artinya kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa jika pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bernilai konstan (tetap), maka kemandirian keuangan daerah akan tetap konstan dengan nilai -0,0386. Sejalan dengan itu, pajak daerah memiliki hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,0285. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak daerah ditambah 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah menjadi sebesar 0,0285%.

Retribusi daerah memiliki hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,0073. Hal ini menyatakan bahwa jika retribusi daerah ditambah 1% maka akan menaikkan kemandirian daerah sebesar 0,0073%. Selanjutnya dana bagi hasil memiliki hubungan positif terhadap kemandirian daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,0146. Hal ini menunjukkan bahwa jika dana bagi hasil ditambah 1% maka akan menaikkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,0146%.

Kemudian dana alokasi umum memiliki hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien sebesar -0,0162. Hal ini menunjukkan bahwa jika DAU ditambah sebesar 1%, maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah menjadi sebesar -0,0162%. Adapun dana alokasi khusus memiliki hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien sebesar -0,0234. Hal ini menunjukkan bahwa jika dana alokasi khusus ditambah 1% maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar -0,0234%.

Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel dummy (pajak daerah miskin) pada estimasi regresi data panel yang sudah dilakukan dan model *Random Effect Model* (REM) juga sebagai model yang tepat pada penelitian penambahan variabel dummy tersebut. Sehingga persamaan regresinya dapat disusun sebagai berikut :

$$KKD=c + \beta_1Pd + \beta_2Rd + \beta_3DBH + \beta_4DAU + \beta_5DAK + \text{Dummy pajak daerah}$$

Berdasarkan Tabel 9, dapat disusun hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$KKD = -0,1406 + 0,0359Pd + 0,0090Rd + 0,0218DBH - 0,0349DAU - 0,0140DAK - 0,0184DUMMY$$

Pada persamaan regresi di atas menyatakan bahwa terdapat nilai konstanta (C) sebesar -0,1406 yang artinya kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa jika pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bernilai konstan (tetap), maka kemandirian keuangan daerah akan tetap konstan dengan nilai -0,1406. Kemudian pada variabel penambahan yaitu variabel dummy (pajak daerah miskin) memiliki hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien sebesar -0,0184. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dummy ditambah sebesar 1%, maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah menjadi sebesar -0,0184%.

Namun pada nilai probabilitasnya berada di bawah tingkat signifikan 0,05 yaitu 0,0385. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh pajak daerah miskin terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## Pengujian Hipotesis

### Uji statistik F

Dilihat pada Tabel 8, diketahui  $F_{hitung}$  sebesar 8,3802 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,317 pada  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8,3802 > 2,317$ ), dan nilai probabilitas F statistiknya yaitu 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Dan jika dibandingkan dengan hasil dari regresi dengan variabel penambahan dummy pajak yang dapat dilihat pada Tabel 9, diketahui  $F_{hitung}$  sebesar 25,099 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,317 pada  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $25,099 > 2,317$ ), dan nilai probabilitas F statistiknya yaitu 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

### Uji t

#### Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dilihat pada Tabel 8, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai koefisien 0,0285 dengan  $t_{hitung}$  sebesar 4,5300 dan probability 0,0000. Oleh karena itu  $t_{hitung}$  ( $4,5300$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,0000$ )  $<$   $0,05$  maka  $H_1$  diterima yang artinya Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dan jika dibandingkan pada

hasil regresi dengan penambahan variabel dummy pajak yang dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,6212 dan probability 0,0000. Sehingga  $t_{hitung}$  ( $6,6212$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,0000$ )  $<$   $0,05$  maka  $H_1$  diterima yang artinya Pajak Daerah dengan variabel dummy juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

### **Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 8, menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki nilai koefisien 0,0073 dengan  $t_{hitung}$  sebesar 1,4708 dan probability 0,1449. Oleh karena itu  $t_{hitung}$  ( $1,4708$ )  $<$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,1449$ )  $>$   $0,05$  maka  $H_2$  ditolak yang artinya Retribusi Daerah berpengaruh tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dan jika dibandingkan pada hasil regresi dengan penambahan variabel dummy pajak yang dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,6389 dan probability 0,1048. Sehingga  $t_{hitung}$  ( $1,6389$ )  $<$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,1048$ )  $>$   $0,05$  maka  $H_2$  ditolak yang artinya Retribusi Daerah dengan variabel dummy juga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Retribusi daerah juga merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang penting setelah pajak daerah, dimana retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dan juga berkontribusi dalam peningkatan PAD. Namun pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Karena penerimaan retribusi lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pajak daerah yang merupakan komponen paling dominan penerimaannya, dan pemerintah daerahnya masih sangat membutuhkan dana transfer untuk membiayai belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan daerahnya

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dilihat pada Tabel 8, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki nilai koefisien 0,0146 dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2,2312 dan probability 0,0282. Oleh karena itu  $t_{hitung}$  ( $2,2312$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,0282$ )  $<$   $0,05$

maka  $H_3$  diterima yang artinya Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dan jika dibandingkan pada hasil regresi dengan penambahan variabel dummy pajak yang dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,0083 dan probability 0,0034. Sehingga  $t_{hitung}$  ( $3,0083$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,0034$ )  $<$   $0,05$  maka  $H_3$  diterima yang artinya pada hasil regresi dengan penambahan variabel dummy, Dana Bagi Hasil juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan harapan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, karena DBH merupakan dana perimbangan yang sangat penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah dikarenakan penerimaannya berdasarkan atas sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 8, menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki nilai koefisien -0,0162 dengan  $t_{hitung}$  sebesar -0,5539 dan probability 0,5810. Oleh karena itu  $t_{hitung}$  ( $-0,5539$ )  $<$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,5810$ )  $>$   $0,05$  maka  $H_4$  ditolak yang artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan pada hasil regresi dengan penambahan variabel dummy pajak yang dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,2384 dan probability 0,2189. Sehingga  $t_{hitung}$  ( $-1,2384$ )  $<$   $t_{tabel}$  ( $1,6619$ ) dan nilai probability ( $0,2189$ )  $>$   $0,05$  maka  $H_4$  ditolak yang artinya Dana Alokasi Umum dengan penambahan variabel dummy juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Karena dana alokasi umum digunakan untuk menutupi celah yang terjadi karena kebutuhan daerah lebih besar dari porsi penerimaan daerahnya dan pemerintah daerahnya belum memanfaatkan DAU yang di transfer dari pusat secara efektif dan efisien, dan belum memberikan kontribusi

yang besar kepada pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dilihat pada Tabel 8, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien  $-0,0234$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,1929$  dan probability  $0,0309$ . Oleh karena itu  $t_{hitung} (-2,1929) < t_{tabel} (1,6619)$  dan nilai probability  $(0,0309) < 0,05$  maka  $H_5$  diterima yang artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan pada hasil regresi dengan penambahan variabel dummy pajak yang dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,0261$  dan probability  $0,3076$ . Sehingga  $t_{hitung} (-1,0261) < t_{tabel} (1,6619)$  dan nilai probability  $(0,3076) > 0,05$  maka  $H_5$  ditolak yang artinya hasil regresi dengan penambahan variabel dummy berbeda dengan hasil regresi awal karena Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dana alokasi khusus pada penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan dana alokasi umum, penerimaan dana alokasi khusus yang lebih besar maka akan membuat

daerah tidak dapat dikatakan mandiri. Namun pada penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan karena DAK dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas yang menjadi urusan daerah serta membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana prasarana yang merupakan prioritas nasional

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi. Sementara itu dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan daerah. Sehingga daerah akan lebih baik dan mandiri di masa yang akan datang.

## REFERENSI

- Andriana, N. (2020). **Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah.** *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol 1(2).
- Andriani, R. N. R., dan Wahid, N. N. (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006–2015).** *Jurnal Akuntansi*, vol 13(1): 30-39.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2016-2020. <https://dpkd.sumbarprov.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). 2016-2020. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Ghozali, Imam. (2018). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25.** Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarati, Domador dan Dawn Porter. (2012). **Dasar-dasar Ekonometrika.** Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). **Manajemen Keuangan Sektor Publik.** Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdan, H. (2007). **Analisis Yang Mempengaruhi Faktor-faktor Penerimaan Retribusi Prkir di Kota Jayapura.**
- Junarwati, Hasan Basri, Syukriy Abdullah. (2013). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012.** *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, vol 6(2), 186-193.
- Khusaini, Moh. (2018). **Keuangan Daerah.** Edisi 15.
- Kuswandi, A. (2016). **Manajemen Pemerintah Daerah.** Bekasi: Badan Penerbit UNISMA.
- Lukitawati, L. J., Dematria Pringgabaya (2020). **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.** *Journal of Accountin Taxing and Auditing*, vol 1(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. **Dana Perimbangan.**
- Rachim, A. (2016). **Barometer Keuanga Negara.** Jakarta: CV. Andi Offset.
- Triwulan II. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Sumbar. <http://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/new/id/data-publikasi/berita-terbaru/2907-triwulan-ii-tahun-2021,-ekonomi-sumbar-tumbuh-5,76-persen.html>. 16 Agustus 2021.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. **Tentang Pemerintahan Daerah.**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- Yani, Ahmad. (2013). **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.** Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoda, T. C., Rina Febriani (2019). **Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Antarkota Di Sumatera Barat.** *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol 3(4).